

ABSTRAK

Banyaknya kejadian kekerasan seksual terhadap anak mendorong pemerintah untuk membuat dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memuat sanksi baru berupa kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak. Hukuman kebiri kimia ini merupakan reaksi dari banyaknya kasus seksual terhadap anak, dikarenakan penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan seksual dianggap tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus Putusan No. 2627 /Pid.Sus/2019/PN.SBY. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu yang sedang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Kebijakan berupa sanksi tindakan kebiri kimia masih mempunyai kekurangan, salah satunya adalah belumlah membentuk peraturan pemerintah tentang tata cara prosedur pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia. Penerapan hukuman tindakan kebiri kimia belum bisa dibilang efektif. Salah satu faktor yang menyebabkan belum efektif karena tindakan tersebut di Indonesia belum pernah dilaksanakan. Dalam penerapan tindakan ini yang diharapkan untuk membuat jera para pelaku kejahatan kekerasan seksual bisa dibilang efektif jika setelah tindakan kebiri kimia ini sudah terlaksanakan dan memberikan hasil seperti menurunnya angka kekerasan seksual terhadap anak karena adanya sanksi tersebut.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia, Pelaku Kejahatan Kekerasan seksual

ABSTRACT

The number of incidents of sexual violence against children prompted the government to make and ratify Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which contains new sanctions in the form of chemical castration against sexual abuse of children. child. Chemical castration punishment is a reaction from many sexual cases against children, because the imprisonment of prison convicts against sexual offenders is considered ineffective in reducing cases of sexual violence against children.

This research was conducted with a case study of Decision No. 2627 / Pid.Sus/2019/PN.SBY. The method of approach used in this study is the Normative Juridical approach, which is a study conducted by examining library materials or secondary materials. Legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines that are useful for addressing the issue at hand.

The results of this study indicate that the policy in the form of chemical castration sanctions still has shortcomings, one of which is the absence of a government regulation on procedures for implementing castration chemical procedures in Indonesia. The application of chemical castration punishment has not been considered effective. One of the factors that caused it has not been effective because the action in Indonesia has never been implemented. In the application of this action it is expected to deter perpetrators of sexual violence crimes can be considered effective if after these chemical castration actions have been carried out and provide results such as decreasing rates of sexual violence against children due to these sanctions

Keywords : ***Application of Chemical Castration Sanctions, Actors of Crimes of Sexual Violence***